

ASPEK HUKUM KEDOKTERAN KEHAKIMAN DALAM PEMERIKSAAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Hernawati RAS¹, Nisaa'i Ramilinia Panuluh², Muhammad Akbar Ramadhan Munandar³, Gabriella Selara Pangarepo⁴

^{1,2,3,4}Universitas Langlangbuana

hernawariras57@gmail.com¹, liniapanuluh@gmail.com², akbarm69927@gmail.com³, gabriellaselara@gmail.com⁴

ABSTRACT; *Sexual violence is a serious social problem in Indonesia that requires integrated intervention between the legal and medical sectors. This study aims to analyze the legal aspects of forensic medicine in the examination of victims of sexual violence, identify the challenges faced by medical personnel, and understand the role of relevant institutions in providing protection for victims. Using normative juridical research methods and a literature review approach, this study explores the regulation and effectiveness of legal norms in forensic medical practice. The results indicate that forensic medicine plays a vital role by providing scientific evidence in the form of a post-mortem examination (visum et repertum), which serves as strong evidence in the judicial process. However, its implementation still faces various challenges, such as social stigma against victims, psychological trauma, limited healthcare facility resources, and variations in the quality of medical reports. This study concludes that the protection of victims' rights and legal certainty are highly dependent on the competence of medical personnel and collaborative synergy between law enforcement and healthcare institutions. It is recommended that specialized training for forensic physicians be increased and regulatory policies strengthened to ensure justice for victims of sexual violence.*

Keywords: *Forensic Medicine, Sexual Violence, Victim Protection, Post-mortem Examination (Visum et Repertum), Medical Personnel.*

ABSTRAK; Kekerasan seksual merupakan masalah sosial serius di Indonesia yang memerlukan penanganan terintegrasi antara sektor hukum dan medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum kedokteran kehakiman dalam pemeriksaan korban kekerasan seksual, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi tenaga medis, serta memahami peran lembaga terkait dalam memberikan perlindungan bagi korban. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini mengeksplorasi regulasi dan efektivitas norma hukum dalam praktik kedokteran forensik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedokteran kehakiman memegang peranan vital melalui penyediaan bukti ilmiah berupa visum et repertum yang menjadi alat bukti kuat dalam proses peradilan. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti stigma sosial terhadap korban, trauma psikologis,

keterbatasan sumber daya fasilitas kesehatan, serta variasi kualitas laporan medis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hak-hak korban dan kepastian hukum sangat bergantung pada kompetensi tenaga medis serta sinergi kolaboratif antara aparat penegak hukum dan institusi kesehatan. Disarankan adanya peningkatan pelatihan khusus bagi dokter forensik dan penguatan regulasi kebijakan untuk menjamin keadilan bagi korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: Kedokteran Kehakiman, Kekerasan Seksual, Perlindungan Korban, Visum Et Repertum, Tenaga Medis.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu isu serius yang dihadapi masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Berdasarkan data dari Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), pada tahun 2020 terdapat lebih dari 300.000 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan lebih dari 40% di antaranya merupakan kekerasan seksual.¹ Angka ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya masalah individu, tetapi juga merupakan masalah sosial yang memerlukan perhatian dan penanganan yang serius dari berbagai pihak, termasuk lembaga hukum dan medis.

Kedokteran forensik memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan seksual. Ilmu kedokteran forensik menyediakan bukti-bukti ilmiah yang krusial untuk mendukung proses hukum. Sebagai contoh, visum et repertum yang dibuat oleh dokter forensik dapat menjadi alat bukti yang sangat kuat dalam persidangan. Kalangit (2013) menjelaskan bahwa peran ilmu kedokteran forensik dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan sangat vital, karena dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi fisik korban serta bukti-bukti yang mendukung pernyataan korban.²

Di sisi lain, tantangan dalam pemeriksaan korban kekerasan seksual juga tidak bisa diabaikan. Proses pemeriksaan sering kali diwarnai dengan stigma sosial, trauma psikologis, dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Banyak korban yang enggan melaporkan kejadian yang mereka alami karena takut akan penilaian negatif dari

¹ Komisi Nasional Perempuan. (2020). Laporan Tahunan Komnas Perempuan 2020. Jakarta: Komnas Perempuan.

² Kalangit, A. (2013). Peran ilmu kedokteran forensik dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan sebagai kejahatan kekerasan seksual. *e-CliniC*, 1(1).

masyarakat atau bahkan dari pihak berwenang. Hal ini diperparah dengan kurangnya pemahaman tentang hak-hak mereka dan proses hukum yang harus dilalui. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai aspek hukum kedokteran forensik dalam kasus kekerasan seksual.

Pemeriksaan korban kekerasan seksual menjadi krusial untuk mendapatkan bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Aspek hukum kedokteran kehakiman menjadi penting karena melibatkan pengetahuan medis yang digunakan untuk mendukung proses hukum. Proses ini tidak hanya melibatkan dokter, tetapi juga pihak kepolisian, jaksa, dan pengacara yang berperan dalam memastikan keadilan bagi korban. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum kedokteran kehakiman sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak korban dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan.

Kualitas visum et repertum juga menjadi sorotan penting. Soularto dan Cahyanti (2009) dalam penelitian mereka menemukan bahwa terdapat variasi dalam kualitas visum et repertum yang dihasilkan oleh dokter spesialis.³ Hal ini dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan dan pada gilirannya, proses hukum yang dihadapi oleh korban. Dengan demikian, peningkatan kualitas pemeriksaan medis dan konsistensi dalam penanganan kasus kekerasan seksual menjadi sangat penting untuk memastikan keadilan bagi korban.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak perempuan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi korban. Namun, tantangan masih tetap ada, termasuk kurangnya pemahaman di kalangan tenaga medis tentang prosedur pemeriksaan yang tepat dan sensitivitas yang diperlukan dalam menangani korban. Dalam banyak kasus, ketidapkahaman ini dapat mengakibatkan bukti yang hilang atau tidak valid, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi hasil dari proses hukum.

Stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual sering kali menjadi penghalang bagi mereka untuk melaporkan kasus yang dialaminya. Banyak korban merasa takut untuk berbicara atau mencari bantuan karena khawatir akan penilaian negatif dari

³ Soularto, D. S., & Cahyanti, E. S. D. (2009). Analisis Kualitas Visum et Repertum Beberapa Dokter Spesialis pada Korban Kekerasan Seksual di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. *Mutiara Medika: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 9(1).

masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan aman bagi korban agar mereka dapat melaporkan kejadian yang dialaminya tanpa rasa takut. Dalam hal ini, pendidikan dan pelatihan bagi tenaga medis tentang bagaimana menangani korban kekerasan seksual dengan empati dan profesionalisme sangatlah penting.

Dengan latar belakang tersebut, makalah ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam aspek hukum kedokteran kehakiman dalam pemeriksaan korban kekerasan seksual, serta tantangan dan solusi yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan dan perlindungan bagi korban.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mengidentifikasi masalah utama:

1. Apa saja aspek hukum yang terlibat dalam kedokteran kehakiman terkait pemeriksaan korban kekerasan seksual?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh tenaga medis dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban kekerasan seksual?
3. Bagaimana peran lembaga hukum dan medis dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis aspek hukum yang terlibat dalam kedokteran kehakiman terkait pemeriksaan korban kekerasan seksual.
2. Untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh tenaga medis dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban kekerasan seksual.
3. Untuk memahami peran lembaga hukum dan medis dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual.

Manfaat Penelitian

1. Bagi Tenaga Medis

Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang prosedur pemeriksaan yang tepat dan aspek hukum yang harus diperhatikan saat menangani korban kekerasan

seksual. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan medis dan mengurangi kesalahan dalam pengumpulan bukti.

2. Bagi Masyarakat

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dan peran kedokteran kehakiman dalam memastikan keadilan. Dengan meningkatnya pemahaman ini, diharapkan stigma terhadap korban dapat berkurang dan dukungan terhadap mereka dapat meningkat.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai interaksi antara hukum dan ilmu kedokteran, khususnya dalam hal penanganan kasus kekerasan seksual. Peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana prosedur medis dan hukum saling terkait, serta bagaimana hasil pemeriksaan kedokteran dapat mempengaruhi proses hukum yang dihadapi oleh korban. Penelitian ini juga dapat membuka wawasan baru mengenai pentingnya bukti medis dalam mendukung klaim hukum, yang pada gilirannya dapat membantu meningkatkan keadilan bagi korban

4. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan regulasi yang lebih baik dalam perlindungan korban kekerasan seksual. Dengan data dan analisis yang akurat, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat dalam menangani isu ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Kedokteran kehakiman adalah cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada penerapan prinsip-prinsip medis dalam konteks hukum. Dalam pemeriksaan korban kekerasan seksual, kedokteran kehakiman berperan penting dalam memberikan bukti-bukti medis yang dapat digunakan di pengadilan. Kedokteran kehakiman tidak hanya berfungsi untuk mendiagnosis cedera fisik, tetapi juga untuk mendokumentasikan kondisi psikologis korban. Hal ini sangat penting, mengingat banyak korban kekerasan seksual mengalami trauma yang mendalam, yang memerlukan perhatian medis dan hukum yang serius.

Kedokteran kehakiman berfungsi sebagai jembatan antara ilmu medis dan sistem peradilan. Sebuah studi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2021) menunjukkan bahwa banyak kasus kekerasan seksual tidak terungkap karena kurangnya pemahaman tentang proses hukum dan ketidakpercayaan terhadap sistem.⁴ Oleh karena itu, penting bagi tenaga medis yang terlibat dalam pemeriksaan korban untuk memahami aspek hukum yang berlaku, agar dapat memberikan bantuan yang tepat dan efektif. Pemeriksaan medis pada korban kekerasan seksual harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan sensitif.

Kedokteran forensik merupakan cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada penerapan prinsip-prinsip medis dan ilmiah dalam konteks hukum. Dalam kasus kekerasan seksual, kedokteran forensik berperan penting dalam proses pemeriksaan dan pengumpulan bukti. Menurut Palupi dan Irawati (2025), peran kedokteran forensik dalam pengungkapan kasus tindak pidana kekerasan seksual di Provinsi Kep. Bangka Belitung menunjukkan bahwa pemeriksaan medis yang dilakukan oleh tenaga medis terlatih dapat memberikan bukti yang kuat dalam proses hukum.⁵

Prosedur ini tidak hanya melibatkan pemeriksaan fisik, tetapi juga pengambilan riwayat medis dan psikologis yang lengkap. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai kondisi korban, sehingga bukti yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Proses ini juga harus dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih dalam kedokteran kehakiman, agar hasil pemeriksaan dapat diakui secara hukum. Dengan demikian, kedokteran kehakiman memiliki peranan yang sangat penting dalam konteks hukum, terutama dalam kasus kekerasan seksual. Pengetahuan yang mendalam tentang prosedur medis dan hukum yang berlaku sangat diperlukan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan keadilan yang layak.

Tenaga medis, khususnya dokter yang terlatih dalam kedokteran kehakiman, memiliki peranan yang sangat vital dalam proses pemeriksaan korban kekerasan seksual. Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan fisik, tetapi juga untuk memberikan dukungan emosional kepada korban. Proses pemeriksaan harus

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). Laporan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan. Jakarta: KemenPPPA.

⁵ Palupi, W. H. D., & Irawati, A. C. (2025). Peran Kedokteran Forensik dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidanan Kekerasan Seksual di Provinsi Kep. Bangka Belitung: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(2), 8183-8190.

dilakukan dengan mempertimbangkan aspek etis dan hukum. Tenaga medis harus memastikan bahwa semua tindakan yang diambil sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak korban. Seorang dokter forensik melakukan pemeriksaan dengan sangat hati-hati, memastikan bahwa korban merasa nyaman dan tidak tertekan. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian menjadi bukti yang kuat di pengadilan.

Proses pemeriksaan korban kekerasan seksual dimulai segera setelah laporan kejadian diterima. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bukti-bukti yang ada tidak hilang atau terkompromi. Menurut Cipta (2010), pemeriksaan harus dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki keahlian khusus dalam kedokteran forensik untuk mendapatkan hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁶

Pemeriksaan biasanya dilakukan di rumah sakit atau klinik yang memiliki fasilitas khusus untuk menangani kasus kekerasan seksual. Proses ini mencakup pengambilan riwayat medis, pemeriksaan fisik, serta pengumpulan sampel biologis seperti darah, air liur, atau jaringan tubuh. Data dari penelitian menunjukkan bahwa pengambilan sampel dalam waktu 72 jam setelah kejadian dapat meningkatkan kemungkinan menemukan bukti yang relevan.

Selama pemeriksaan, penting bagi tenaga medis untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi korban. Trauma yang dialami korban sering kali membuat mereka merasa tertekan dan tidak nyaman saat menjalani pemeriksaan. Oleh karena itu, pendekatan yang empatik dan sensitif sangat diperlukan untuk membantu korban merasa lebih tenang dan kooperatif. Setelah pemeriksaan selesai, hasilnya akan dicatat dalam bentuk laporan medis yang berfungsi sebagai bukti dalam proses hukum. Laporan ini harus mencakup detail tentang kondisi fisik korban, temuan medis, serta rekomendasi untuk perawatan lebih lanjut jika diperlukan. Dalam banyak kasus, laporan medis ini menjadi salah satu bukti kunci dalam persidangan. Dengan demikian, proses pemeriksaan korban kekerasan seksual merupakan langkah krusial dalam penegakan hukum. Keakuratan dan keandalan laporan medis sangat bergantung pada kompetensi tenaga medis yang melakukan pemeriksaan. Oleh karena itu, pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga medis dalam bidang kedokteran forensik sangat diperlukan.

⁶ Cipta, H. (2010). peranan ilmu kedokteran forensik dalam pembuktian tindak pidana perkosaan sebagai kejahatan kekerasan seksual (studi kasus di pengadjan negeri medan).

Salah satu tantangan yang dihadapi tenaga medis adalah stigma sosial yang melekat pada korban kekerasan seksual. Banyak korban merasa malu atau takut untuk melaporkan kejadian yang mereka alami. Oleh karena itu, tenaga medis harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk membangun kepercayaan dengan korban. Penting bagi tenaga medis untuk memahami prosedur hukum yang berlaku saat menangani kasus kekerasan seksual. Mereka harus mengetahui bagaimana cara mengumpulkan dan mendokumentasikan bukti yang diperlukan untuk mendukung proses hukum. Pelatihan dan pendidikan bagi tenaga medis menjadi sangat penting. Program-program pelatihan yang berfokus pada kedokteran kehakiman dan penanganan korban kekerasan seksual harus diperluas. Dengan demikian, tenaga medis akan lebih siap dalam menjalankan tugas mereka dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi korban.

Proses pemeriksaan medis pada korban kekerasan seksual umumnya terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilalui dengan hati-hati. Tahapan ini dimulai dengan pengumpulan informasi awal, di mana tenaga medis akan melakukan wawancara dengan korban untuk mendapatkan riwayat kejadian. Pengumpulan informasi yang akurat sangat penting untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam pemeriksaan.

Pemeriksaan fisik dilakukan untuk mendeteksi adanya cedera atau tanda-tanda kekerasan. Proses ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan memperhatikan kenyamanan korban. Dalam banyak kasus, korban mungkin mengalami trauma yang membuat mereka merasa tidak nyaman saat diperiksa. Oleh karena itu, penting bagi tenaga medis untuk menciptakan suasana yang aman dan mendukung.

Pengambilan sampel juga merupakan bagian penting dari proses pemeriksaan. Sampel ini bisa berupa darah, air liur, atau bukti fisik lainnya yang dapat membantu dalam proses penyelidikan. Pengambilan sampel yang tepat dan sesuai prosedur dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang teknik pengambilan sampel sangat diperlukan bagi tenaga medis.

Meskipun kedokteran kehakiman memiliki peranan yang penting dalam pemeriksaan korban kekerasan seksual, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah stigma sosial yang masih melekat pada korban. Banyak korban merasa tertekan untuk melaporkan kejadian yang mereka alami karena takut akan

penilaian negatif dari masyarakat. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak korban juga menjadi masalah. Banyak korban yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan perawatan medis dan dukungan hukum. Hal ini membuat mereka terjebak dalam situasi yang sulit dan tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya.

Tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya di fasilitas kesehatan. Banyak rumah sakit dan klinik yang tidak memiliki tenaga medis yang terlatih dalam kedokteran kehakiman. Hal ini mengakibatkan banyak korban tidak mendapatkan pemeriksaan yang memadai. Proses hukum yang panjang dan rumit juga menjadi tantangan bagi korban. Banyak dari mereka yang merasa frustrasi dengan lambatnya proses penyelidikan dan persidangan yang membuat banyak korban merasa putus asa dan kehilangan harapan untuk mendapatkan keadilan.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih besar dari pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Edukasi mengenai hak-hak korban, peningkatan kapasitas tenaga medis, serta reformasi dalam sistem hukum adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk memastikan bahwa korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan dan keadilan yang layak.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan makalah ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang relevan dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta literatur akademis yang relevan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku dan bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai regulasi yang ada, serta menilai efektivitasnya dalam melindungi keselamatan pasien. Data yang digunakan adalah data sekunder dari berbagai sumber, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan literatur akademis yang relevan. Sumber-sumber ini akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang kerangka hukum yang ada dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan kebijakan

kehatan yang lebih baik, yang tidak hanya mendukung inovasi tetapi juga menjamin keselamatan pasien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kedokteran kehakiman, pemeriksaan terhadap korban kekerasan seksual melibatkan berbagai aspek hukum yang sangat penting. Salah satu aspek hukum yang paling mendasar adalah perlindungan hukum terhadap korban. Menurut Widagdo dan Yusuf (2024), visum et repertum merupakan alat bukti yang sangat penting dalam proses hukum untuk membuktikan adanya tindakan kekerasan seksual. Dalam hal ini, dokter forensik berperan sebagai saksi ahli yang memberikan keterangan berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang dilakukan. Selain itu, terdapat juga aspek hukum mengenai hak-hak korban. Korban kekerasan seksual berhak mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengakui pentingnya perlindungan terhadap korban, yang berimplikasi pada prosedur pemeriksaan yang harus dilakukan oleh tenaga medis.

Proses pemeriksaan juga harus memperhatikan aspek etika dan privasi. Dokter yang melakukan pemeriksaan harus memastikan bahwa semua informasi yang diperoleh dari korban dijaga kerahasiaannya. Pelanggaran terhadap privasi korban dapat berakibat pada dampak psikologis yang lebih besar bagi korban, dan dapat menghambat proses hukum. Oleh karena itu, penting bagi tenaga medis untuk memahami dan mematuhi kode etik kedokteran yang berlaku.

Statistik menunjukkan bahwa kekerasan seksual di Indonesia masih menjadi masalah serius. Menurut data dari Komisi Nasional Perempuan, pada tahun 2021 terdapat lebih dari 300.000 laporan kekerasan seksual, dengan angka yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan pemeriksaan yang tepat dan hukum yang melindungi korban sangat mendesak. Dalam hal ini, kedokteran kehakiman memiliki peran yang sangat strategis dalam membantu korban mendapatkan keadilan.

Dengan demikian, aspek hukum yang terlibat dalam kedokteran kehakiman tidak hanya berkaitan dengan prosedur pemeriksaan, tetapi juga mencakup perlindungan hak-hak korban, etika medis, dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Oleh

karena itu, sinergi antara tenaga medis dan lembaga hukum sangat diperlukan untuk menciptakan sistem yang lebih baik dalam menangani kasus kekerasan seksual.

Lembaga hukum dan medis memiliki peran yang saling melengkapi dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual. Lembaga hukum, seperti kepolisian dan pengadilan, bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memastikan bahwa pelaku kekerasan seksual diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, lembaga medis, khususnya dokter forensik, berperan dalam melakukan pemeriksaan dan memberikan bukti medis yang diperlukan dalam proses hukum.

Menurut Susanti (2022), peran dokter dalam pelayanan kedokteran forensik sangat krusial. Dokter tidak hanya bertugas untuk melakukan pemeriksaan fisik, tetapi juga untuk memberikan penjelasan yang jelas dan akurat mengenai kondisi medis korban. Hal ini penting agar informasi yang disampaikan dapat digunakan sebagai bukti yang kuat dalam persidangan. Selain itu, dokter juga harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan korban, sehingga korban merasa nyaman dan aman selama proses pemeriksaan. Salah satu contoh konkret mengenai kolaborasi antara lembaga hukum dan medis dapat dilihat dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi di Jakarta pada tahun 2020. Dalam kasus tersebut, dokter forensik bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum yang berlangsung. Ini menunjukkan bahwa kerja sama yang baik antara kedua lembaga dapat mempercepat proses penegakan hukum dan memberikan keadilan bagi korban.

Namun, tantangan tetap ada dalam kolaborasi ini. Seringkali, terdapat kesenjangan komunikasi antara tenaga medis dan aparat penegak hukum, yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengumpulan bukti. Oleh karena itu, pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan bagi tenaga medis dan aparat hukum sangat penting untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang peran masing-masing dalam menangani kasus kekerasan seksual. Peran lembaga hukum dan medis dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual sangatlah penting dan harus dilakukan secara sinergis. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di masa depan.

Tenaga medis yang terlibat dalam pemeriksaan korban kekerasan seksual sering kali menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah stigma sosial yang melekat pada korban kekerasan seksual. Banyak korban yang merasa malu atau takut untuk melaporkan kejadian yang mereka alami, yang dapat mengakibatkan keterlambatan dalam pemeriksaan medis. Hal ini tentunya mengurangi efektivitas pemeriksaan dan dapat mempengaruhi hasil visum et repertum yang dihasilkan.

Tekanan emosional juga menjadi tantangan yang signifikan bagi tenaga medis. Menghadapi korban yang mengalami trauma berat dapat mempengaruhi kondisi psikologis tenaga medis itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi institusi medis untuk menyediakan dukungan psikologis bagi tenaga medis yang terlibat dalam pemeriksaan kasus kekerasan seksual. Hal ini dapat membantu mereka untuk tetap profesional dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan yang ada, penting bagi tenaga medis untuk terus meningkatkan kompetensi dan keterampilan mereka dalam menangani kasus kekerasan seksual. Pelatihan yang berkelanjutan dan dukungan dari lembaga terkait akan sangat membantu dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi korban dan tenaga medis itu sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kekerasan seksual merupakan salah satu masalah sosial yang mendalam dan kompleks, yang tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga menimbulkan tantangan hukum yang signifikan. Pemeriksaan terhadap korban kekerasan seksual memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum. Pentingnya perlindungan terhadap privasi dan hak-hak korban juga harus menjadi perhatian utama. Di sisi lain, tantangan dalam implementasi hukum kedokteran kehakiman juga perlu dihadapi. Kolaborasi antara institusi medis, lembaga hukum, dan organisasi masyarakat sipil sangat penting untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan dalam menangani kasus kekerasan seksual. Aspek hukum kedokteran kehakiman dalam pemeriksaan korban kekerasan seksual merupakan bidang yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang ini sangat penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan

perlindungan dan keadilan yang layak. Melalui kolaborasi yang baik antara berbagai sektor, diharapkan angka kekerasan seksual dapat berkurang dan penegakan hukum dapat berjalan dengan lebih baik.

Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan :

1. Diperlukan program pelatihan khusus bagi tenaga medis, terutama dokter forensik, untuk meningkatkan keterampilan dalam melakukan pemeriksaan pada korban kekerasan seksual. Pelatihan ini harus mencakup aspek teknik pemeriksaan, pengumpulan bukti, serta pemahaman tentang dampak psikologis yang dialami oleh korban.
2. Melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual dan hak-hak korban. Hal ini penting untuk mengurangi stigma yang sering dihadapi oleh korban dan mendorong mereka untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialami.
3. Mendorong kolaborasi antara lembaga hukum, kesehatan, dan organisasi non-pemerintah untuk menciptakan sistem penanganan yang lebih efektif bagi korban kekerasan seksual. Dengan adanya sinergi ini, diharapkan proses hukum dapat berjalan lebih cepat dan adil.
4. Memastikan bahwa korban kekerasan seksual memiliki akses yang mudah dan cepat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk pemeriksaan forensik dan dukungan psikologis.
5. Menyusun dan memperbarui kebijakan yang berkaitan dengan penanganan kasus kekerasan seksual, sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban dan memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. (2023). *Hukum Kesehatan Praktik Kedokteran Telemedicine*. Deepublish.
- Faatiha NA, Madjid A, Maharani F. Urgensi Pengaturan Hukum Dan Tanggung Jawab dalam Telesurgery Di Indonesia. *RechtJiva*. 2025 Jul 28.

- Faatiha, N. A., Madjid, A., & Maharani, F. (2025). Urgensi Pengaturan Hukum Dan Tanggung Jawab dalam Telesurgery Di Indonesia. *RechtJiva*.
- Gunawan, L. M., Perwira, I., & Raksanagara, A. (2020). Implementasi Perlindungan Hukum Dalam Bidang Kesehatan Terhadap Penelitian Subjek Manusia Di Rumah Sakit Pendidikan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 243-254.
- IOM. (2020). *To Err Is Human: Building a Safer Health System*. *Institute of Medicine*.
- Mubarak, H., Miliyandra, M., Priyanto, E., Respati, G., & Wiradirja, I. R. (2025). Legal and Ethical Aspects of Biotechnology Utilization for Public Health Improvement. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 4(1), 273–280.
- Pertiwi, W., Judijanto, L., Apriansi, M., Suparningtyas, J. F., Lada, Y. G., Mahyuni, S., & Nuroniah, H. S. (2025). *Bioteknologi: Teori dan Penerapan dalam Berbagai Bidang*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sasongko NH, Putra RA, Lidiyawati H, KEP S, KEP NM, Andarmoyo S. *Revolusi Kesehatan: Kolaborasi Teknologi, Inovasi, Dan Kebijakan*. PT. Nawala Gama Education; 2025 Jun 20.
- WHO. (2025). *Biotechnology and Health: A Global Perspective*. World Health Organization.
- Wijayanti, E. D., Calypranti, R., Virgiri, R. P., Christianto, A., Hasani, N., Farm, M. S., ... & Biotech, M. (2025). *Bioteknologi: Prinsip, Aplikasi, dan Inovasi di Era Modern*. PT Bukuloka Literasi Bangsa.